

**BUNGA RAMPAI**  
**TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

**Permasalahan terkait Dana Otsus Prov. Papua, DBH dan BUM Desa**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**2018**



Copyright @ 2018

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI

Disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

**Penanggungjawab/Kepala Pusat**

Dr. Asep A. Saefuloh, M.Si

**Kontributor**

- ∴ Slamet Widodo, S.E., M.E.
- ∴ Marihot Nasution, S.E., M.Si.
- ∴ Ade Nurul Aida, S.E.
- ∴ Rendy Alvaro, S.Sos
- ∴ Firly Nur Agustiani, SE,MM
- ∴ Febriana Elia N, S.Pd, M.Sc
- ∴ Emilia Octavia, S.T. M.Ak
- ∴ Ervita Luluk Zahara, SE
- ∴ Dyah Maysarah, S.Hut

**Penyunting dan Disain Sampul**

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Cetakan Pertama, Juni 2018

ISBN 978-602-50563-4-5

Diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas terbitnya buku **Bunga Rampai Transfer ke Daerah dan Dana Desa** yang merupakan bentuk komitmen Tim Penyusun Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian bagi Dewan. Saya berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi untuk membantu para anggota Dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan.

Buku ini menguraikan beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, kebijakan atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencakup DBH minyak dan gas dan DBH sumberdaya kehutanan, serta pengelolaan dana desa bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Intisari pembahasan dana Otsus Papua mencakup trend kenaikan alokasi dana setiap tahunnya yang dikaitkan dengan kinerja dari indikator kesejahteraan masyarakat setempat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Indikator kesejahteraan rakyat melalui alokasi anggaran pengentasan kemiskinan juga menjadi sorotan dalam pengelolaan DBH Migas, khususnya bagi daerah penghasil. Beberapa daerah penghasil minyak dan gas, yang juga menerima alokasi DBH terbesar, nyatanya belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnya.

Sementara itu terkait dengan DBH sektor kehutanan, masih ditemukan adanya persoalan terkait regulasi penggunaan dana reboisasi, khususnya pasca pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Provinsi. Dalam pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan BUM Desa, masih dijumpai permasalahan terkait kompetensi manajerial pengelola BUM Desa, koordinasi lintas sector yang terkait dengan lingkup usaha BUM Desa, dan sosialisasi keberadaan BUM Desa bagi kepentingan masyarakat setempat.

Adapun maksud penyusunan buku ini adalah sebagai bentuk dukungan substantif Badan Keahlian DPR RI dan sumbangan pemikiran bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Saya menghargai usaha yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun dan berharap agar buku ini tetap *up-to-date* sesuai dengan perubahan dan permasalahan yang terus berkembang, demi perbaikan buku di masa yang akan datang.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan atas jerih payah para penulis, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat Kajian Anggaran,



DR. Asep Ahmad Saefuloh, S.E, M.Si

# DAFTAR ISI

---

## EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) PROPINSI PAPUA

1

- ❖ Perkembangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua
  - ❖ Kondisi Penduduk Miskin Papua
- ❖ Efektivitas Pemanfaatan Dana Otsus Pada Bidang Prioritas
- ❖ Temuan BPK Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua

---

## EVALUASI KEBIJAKAN DBH MIGAS

19

- ❖ Peran DBH Bagi Daerah
  - ❖ DBH Migas Selama Ini
- ❖ Permasalahan yang Muncul dalam Alokasi DBH Migas
  - ❖ Peran DBH Migas bagi Pembangunan Daerah

---

## DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN (DANA REBOISASI) : KEBIJAKAN DAN PERMASALAHANNYA

36

- ❖ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Desentralisasi
  - ❖ Perkembangan DBH Dana Reboisasi
  - ❖ Kebijakan DBH Dana Reboisasi
- ❖ Implementasi dan Permasalahan DBH Dana Reboisasi

---

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN BUM DESA

56

- ❖ Desa dan Dana Desa
  - ❖ Peran Dana Desa untuk Pemberdayaan
  - ❖ Cerita Singkat BUMDesa yang Telah Lahir

---

## PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN MELALUI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUM DESA

73

- ❖ BUM Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Perdesaan
  - ❖ Unit Usaha Simpan Pinjam Pada BUM Desa
  - ❖ Lembaga Keuangan Mikro
- ❖ Kendala Dalam Mengembangkan BUM Desa Dan LKM Di Desa